



KERANGKA ACUAN KEGIATAN

Konsolidasi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pemantauan Pengadaan Publik Berbasis Warga Kabupaten Jember,

Latar Belakang

Situasi demokrasi di Indonesia saat ini menuju "despotisme baru". Gejala ini ditandai dengan kecenderungan perluasan kekuasaan eksekutif untuk mengontrol peradilan dan mengancam supremasi hukum karena menggunakan metode anti demokrasi dalam menjalankan kekuasaan. Hal ini misalnya ditandai dengan terganggunya independensi lembaga antikorupsi melalui Revisi UU KPK, Revisi UU Minerba yang mengabaikan faktor kelestarian lingkungan, hingga berlakunya Omnibus Law yang kurang mempertimbangkan akuntabilitas.

Kemerosotan akuntabilitas publik ini juga terjadi tak terkecuali pada sektor pengadaan barang dan/ jasa pemerintah. Warga semakin kurang dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Partisipasi publik dalam advokasi anggaran dan audit sosial proses pengadaan barang dan/ jasa pemerintah juga sulit diakses karena minimnya informasi yang tidak transparan. Situasi ini semakin signifikan karena pengadaan publik merupakan persentase yang substansial dari sekitar 30 persen dari APBN dan menyumbang sekitar 60 persen dari APBD.

Melebarnya risiko korupsi bertambah ketika saat ini proses pengadaan publik berada dalam situasi darurat akibat pandemi Covid-19. Praktik lancung ini misalnya dapat ditemukan pada dugaan pelanggaran penggunaan dana untuk merespon pandemi dengan total nilai Rp 53,9 miliar yang tengah ditelusuri oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan menaikkan harga beli cairan pembersih tangan dari para rekanan proyek, dan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 61 miliar terkait dana penanganan Covid-19 di Kabupaten Minahasa Utara. Sebelumnya KPK telah menangkap mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan mantan Walikota Bandung Barat AA Umbara atas dugaan korupsi barang dan/ jasa terkait penanganan Covid-19.

Memperkuat penguatan akuntabilitas juga semakin menemukan urgensinya mengingat pada tahun 2021 ini, Pemerintah terus melanjutkan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan anggaran yang mencapai Rp 627,93 triliun. Audit sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penggunaan sebesar Rp 607 triliun di tahun lalu menemukan indikasi inefisiensi dan salah sasaran di banyak aspek. Dokumen pemeriksaan dari kalangan auditor menyebutkan penggunaan dan penyaluran dana PEN selama setahun terakhir dinilai belum efektif, transparan dan akuntabel.

Mempertimbangkan situasi diatas, diperlukan agenda penguatan konsolidasi berbasis warga dalam pemantauan pengadaan publik, termasuk pengadaan untuk penanganan Covid-19. Aksi kolektif warga, terutama dengan memperkuat pemberdayaan jaringan kelompok anak muda, perempuan dan kelompok rentan, menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko korupsi pengadaan publik di daerah. Jaringan kelompok advokasi yang dipimpin kelompok muda di daerah akan mampu secara mandiri mendorong partisipasi publik dalam advokasi anggaran dan audit sosial dari proses pengadaan publik.

Tujuan

1. Menggali pengalaman dan tantangan organisasi masyarakat sipil dalam melakukan kegiatan antikorupsi di daerah, terutama dalam pengawasan pengadaan publik;
2. Menggali informasi tentang kebutuhan dan harapan untuk keberlangsungan organisasi masyarakat sipil dalam gerakan antikorupsi di daerah;
3. Mengumpulkan analisis strategi dan aksi tindak lanjut untuk memperluas skema pengawasan publik terhadap pengadaan barang dan/ jasa pemerintah;



Hasil yang Dicapai

1. Informasi mengenai pengalaman dan tantangan organisasi masyarakat sipil dalam melakukan kegiatan antikorupsi di daerah, terutama dalam pengawasan pengadaan publik;
2. Informasi tentang kebutuhan dan harapan untuk keberlangsungan organisasi masyarakat sipil dalam gerakan antikorupsi di daerah;
3. Dokumen analisis strategi dan aksi tindak lanjut untuk memperluas skema pengawasan publik terhadap pengadaan barang dan/ jasa pemerintah;

Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan pertemuan secara fisik pada:

Hari, tanggal	: Selasa-Kamis, 25-27 Mei 2021
Waktu	: 08.30-15.30 WIB
Tempat	: Hotel MEOTEL Jln.Karimata, Jember

Peserta Kegiatan

Seluruh peserta yang terlibat dalam kegiatan ini, panitia telah menerapkan prokes COVID 19.

1. SD INPERS
2. Koalisi Perempuan Indonesia
3. YPSM
4. YPW
5. FLAC
6. PERPENCA
7. Wartawan ANTARA
8. Wartawan RADAR
9. PWI Jember
10. AJI Jember
11. Akademisi Univ.Jember
12. Akademisi Univ.Islam Jember
13. Akademisi Univ.Muhamadiyah
14. 10 orang Pemuda-pemudi (terpilih)

Narahubung

Bayu Dedie Lukito (082331590254), Bambang Teguh Karyanto (087712955126)

Agenda

a. Hari 1

Waktu	Kegiatan	PIC
08.30-09.00	Registrasi	Panitia Lokal
09.30-11.30	Materi I: <i>Demokrasi, Politik dan Masa Depan Gerakan Antikorupsi</i> Narasumber; Agung Dewantara (Praktisi Kebijakan Publik), Bayu Dwi Anggono (Dekan FH Univ.Jember)	Fasilitator
11.30-12.00	Diskusi dan tanya jawab	Fasilitator
12.00-13.00	Istirahat	Fasilitator
13.00-15.00	Materi II: <i>Pengawasan PBJ Pemerintah dan Penanganan Covid-19</i> , narasumber; Ketua SATGAS COVID 19 Pemkab Jember, Kepala ULP Pemkab Jember,	Fasilitator
15.00-15.30	Diskusi dan tanya jawab	Fasilitator
15.30	Penutup	Panitia Lokal

b. Hari 2

Waktu	Kegiatan	PIC
08.30-09.00	Registrasi dan Review Hari 1	Panitia Lokal
09.30-11.30	Materi III: <i>Audit Sosial dan Advokasi Kebijakan Publik berbasis Kerelawanan Anak Muda</i> Narasumber; Hermanto Rohman (Dosen FISIP Univ.Jember, Solihati (Dosen Univ.Islam Jember)	Fasilitator
11.30-12.00	Diskusi dan tanya jawab	Fasilitator
12.00-13.00	Istirahat	Fasilitator
13.00-15.00	Materi IV: Isu Tematik Daerah: <i>DESA, Perempuan dan Anak Muda</i> , Narasumber; Dodik Marduan (Tenaga Ahli P3MD), Eri Andriani (STAPA Institute)	Fasilitator
15.00-15.30	Diskusi dan tanya jawab	Fasilitator
15.30	Penutup	Panitia Lokal

c. Hari 3

Waktu	Kegiatan	PIC
08.30-09.00	Registrasi dan Review Hari 2	Panitia Lokal
09.30-11.30	Penyusunan Rencana Aksi Strategis	Fasilitator
11.30-12.00	Diskusi dan tanya jawab	Fasilitator
12.00-13.00	Istirahat	Fasilitator
13.00-15.00	Pembentukan Komite Anak Muda Pemantau PBJ dan Penyusunan Rencana Tindak Lanjut	Fasilitator
15.00-15.30	Diskusi dan tanya jawab	Fasilitator
15.30	Penutup	Panitia Lokal

Penutup

Demikian kerangka acuan ini dibuat sebagai acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan

Kebutuhan Anggaran

RAB KONSOLIDASI ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL

No	Description	Qty	Unit	Qty	Unit	Cost	Amount
	Pengorganisir						
10	Konsolidasi kelompok masyarakat sipil daerah						
10.01	Meeting Package (3 days)	25	Person	3	Hari	250.000	18.750.000
10.02	Local Transportation (3 days)	25	Person	3	Hari	150.000	11.250.000
10.03	Narasumber	8	person	1	Hari	1.000.000	8.000.000
10.04	Fasilitator	2	person	3	Hari	1.000.000	6.000.000
10.05	Committee Organizer Local (3 days) - Staf dokumentasi dan publikasi (2 orang) - Notulen (1 orang) - Tim admin (3 orang)	6	Person	3	Hari	250.000	4.500.000
10.06	ATK dan Dok.	1	package	1	Kali	800.000	800.000
10.07	Training Kit - Kaos Sablon untuk Youth	25	Person	1	Kali	100.000	2.500.000
10.08	Healthy Kit/Protkes (Hand sanitizer, Mask, Glove, Antigen)	25	Person	1	Kali	300.000	7.500.000
10.09	Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	1	Paket	1	Kali	500.000	500.000
		Total					59.800.000

Penutup

Demikian kerangka acuan ini dibuat sebagai acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan